
BIOFARM
Jurnal Ilmiah Pertanian
ISSN Print: 0216-5430; ISSN Online: 2301-6442
Vol. 20, No. 2, Oktober 2024

Strategi Implementasi Pos Penyuluhan Desa Terhadap Sistem Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Purwodadi

Implementation Strategy of Village Extension Posts on the Agricultural Extension System in Purwodadi

Rivai Muhammad Saleh[*1], Nurlairi[1], Iman Aji Wijoyo[1]
[1]Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Fakultas Peternakan, Polbangtan Malang
*Korespondensi Penulis: rivaivais12@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta merumuskan strategi dalam upaya pengembangan pos penyuluhan desa yang ada di Kecamatan Purwodadi terhadap fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan menteri pertanian nomor 03 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluh pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif dan kuantitatif (mix method). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik FGD (Focus Group Discussion), observasi dan wawancara mendalam (in depht interview). Hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi peningkatan peran pos penyuluhan desa di kecamatan Purwodadi yang dapat diterapkan adalah growth oriented strategy dengan alternatif strategi yakni memanfaatkan program dan dukungan lembaga pendukung penyuluhan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan di pos penyuluhan desa, bekerja sama dengan perusahaan sekitar dalam mengembangkan metode dan model percontohan usaha tani, menyediakan fasilitas, penghargaan dan insentif finansial untuk meningkatkan motivasi kerja penyuluh swakarsa, mengajukan proposal dan rencana anggaran dan biaya pelaksanaan kegiatan di pos penyuluhan desa serta mengembangkan komoditas lokal sebagai upaya untuk menarik jejaring kemitraan dengan perusahaan sekitar.

Kata kunci**:** *Pos penyuluhan desa, Strategi, Implementasi*

ABSTRACT
The purpose of this research is focused on analyzing the implementation of activities and formulating strategies in an effort to develop village extension posts in Purwodadi District for the functions mandated in the regulation of the Minister of Agriculture number 03 of 2018 concerning guidelines for the implementation of agricultural extension workers. The research method used is a combination of qualitative and quantitative methods (mix method). The data collection technique in this study uses focus group discussion techniques, observation and in-depth interviews. The results of the study show that the strategy to increase the role of village extension posts in Purwodadi sub-district that can be applied is a growth oriented strategy with alternative strategies, namely utilizing programs and support from extension support institutions to intensify extension activities at village extension posts, collaborating with surrounding companies in developing methods and models of farming pilot businesses, providing facilities, awards and financial incentives To increase the work motivation of Swakasa Extension Workers, submit proposals and budget plans and implementation costs of activities at the
Keywords: Village Extension Post, Strategy, Implementation

PENDAHULUAN

Sejak terbentuknya sebuah sistem penyuluhan yang diatur dalam undang-undang SP3K nomor 16 tahun 2006, maka dapat dimaknai sebagai upaya revitalisasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia yang bertransformasi menuju paradigma baru. Paradigma baru penyuluhan pertanian di era sekarang lebih mengutamakan pada pendekatan sumber daya manusia, yang dikenal dengan farmer first atau mengubah petani yang memungkinkan terjadi pemberdayaan pada diri petani itu sendiri (Sadono, 2008).

Tujuan yang diharapkan pada paradigma baru penyuluhan pertanian semaksimal mungkin diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau terwujudnya kemandirian petani. Dalam hal ini, tujuan yang diharapkan pada petani agar pribadinya memiliki pengetahuan,

keterampilan dan sikap serta mampu berswadaya mengatasi permasalahan yang ditemukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyuluhan pertanian mempunyai peran yang strategis karena memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal bagi para petani serta mendampingi petani, mengajarkan kepada petani tentang pengetahuan dan keterampilan dalam berusahatani, mendidik para petani agar mampu memberdayakan semua potensi yang dimiliki, serta menyebarluaskan inovasi-inovasi baru kepada petani tentang bagaimana berusahatani dengan baik (Pelawi, dkk 2016).

Dalam perkembangannya, implementasi sistem penyuluhan pertanian didukung dengan berbagai peraturan lainnya sehingga prinsip penyuluhan pertanian yang meliputi aspek sumber daya manusia baik petani atau peternak sebagai pelaku utama maupun penyuluh pertanian, serta pembenahan pada setiap wilayah dengan pembentukan kelembagaan khusus yang menangani penyuluhan dapat terealisasi secara baik. Permentan nomor 03 tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi salah satu produk peraturan yang mendukung implementasi sistem penyuluhan pertanian dan juga mengatur tentang kelembagaan dengan menguraikan fungsi dari kelembagaan khusus pada setiap tingkatan pusat, daerah provinsi, kabupaten dan kecamatan. Kelembagaan penyuluhan adalah entitas yang terpanggil dan atau berkewajiban untuk melaksanakan penyuluhan pertanian (Mardikanto, 2009).

Pada tingkatan paling bawah yakni tingkat kecamatan, penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui balai penyuluhan pertanian dan diturunkan pada tigkatan desa melalui ketersediaan pos penyuluhan desa. Adanya pos penyuluhan desa pada suatu wilayah berkaitan erat dengan legitimasi peran penyuluh pertanian yang memiliki peran sentral sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi kepada petani dan peternak di setiap wilayah binaan. Fungsi pos penyuluhan desa seperti pada pasal 22 yakni sebagai pusat pertemuan untuk para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha dengan beberapa tujuan umum, termasuk menyusun programa desa, melaksanakan kegiatan penyuluhan, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, serta melaksanakan pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan inovasi sehingga dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kelembagaan dikalangan pelaku utama dan pelaku usaha (Kementerian Pertanian, 2018).

Kecamatan Purwodadi pada saat ini telah terdapat beberapa pos penyuluhan desa yang tersebar di empat desa yakni desa Tambaksari, desa Jatisari, desa Gerbo dan desa Cowek. Pada pelaksanaannya pos penyuluhan desa diharapkan dapat dimaksimalkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat desa. Namun seringkali dihadapkan dengan beberapa masalah teknis dan substantif yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pos penyuluhan desa. Adapun beberapa kendala dalam yang teridentifikasi yakni dengan aksesibilitas pos penyuluhan desa yang berada pada wilayah terpencil serta infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, faktor lain yang menjadi penghambat yakni keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga penyuluh serta partisipasi masyarakat yang tidak semuanya aktif dalam setiap program yang rencanakan, sehingga berdampak pada keberlanjutan program lainnya.

Berbagai kendala yang ditemui dalam implementasi pos penyuluhan desa dikhawatirkan dapat mengurangi atau menghambat fungsi-fungsi pos penyuluhan desa dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui evaluasi untuk selanjutnya dilakukan upaya perbaikan melalui perumusan strategi. Evaluasi merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh pengaruh yang dihasilkan atau efektif tidaknya suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal, yang dapat diartikan sebagai pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Sedarmayanti, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka

penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta merumuskan strategi dalam upaya pengembangan pos penyuluhan desa yang ada di Kecamatan Purwodadi terhadap fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan menteri pertanian nomor 03 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluh pertanian.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif dan kuantitatif (mix method). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik FGD (Focus Group Discussion), observasi dan wawancara mendalam (in depht interview). Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner tertutup yang telah dilakukan uji validitas melalui expert judgment. Subjek penelitian yang ditetapkan yakni sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan teknik penetapan subjek penelitian menggunakan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Tabel 1.Daftar Subjek penelitian

No	jabatan	Jumlah (orang)
1.	Penyuluh Pertanian Lapang	6
2.	Pengurus POSLUHDES	24
	Jumlah	30

Analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan implementasi pos penyuluhan desa yang telah berjalan di beberapa desa di kecamatan Purwodadi yakni Desa Gerbo, Desa Cowek, Desa Tambaksari dan Desa Jatisari. Sedangkan analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis scoring dan Analisis SWOT (Strength, Wearkness, Opportunities, Treath) serta analisis QSPM (Quantitative Strategic Planing Matrix) untuk penentuan strategi prioritas. Analisis scoring dilakukan dengan pemberian skor berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi pos penyuluhan desa yang telah dilaksanakan. Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi pengembangan atau peningkatan peran dalam implementasi pos penyuluhan desa.

2.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah langkah analisis yang dikembangkan guna mempermudah para perencana strategi dalam tahap pembentukan strategi. Tahapan ini menggambarkan SWOT menjadi sebuah matriks dan selanjutnya diidentifikasikan semua aspek dalam SWOT. Setelah mendapatkan nilai atau skor IFAS dan EFAS, maka selanjutnya adalah menentukan posisi dalam salah satu kuadran dari empat kuadran yang dimiliki oleh matriks SWOT dan menentukan strategi berdasarkan posisi yang dimiliki tersebut. Kudran-kuadran pada matriks SWOT dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Posisi Pada Kuadran I

Merupakan situasi yang terbentuk oleh potongan sumbu horisontal positif (Kekuatan) dan potongan sumbu vertikal positif (Peluang). Pada posisi ini strategi yang harus di terapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).

2. Posisi Pada Kuadran II

Merupakan situasi yang terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (Peluang) dan potongan sumbu horisontal negatif (Kelemahan). Strategi yang dapat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan menggunakan strategi diversifikasi.

3. Posisi Pada Kuadran III

Merupakan situasi yang terbentuk oleh potongan sumbu horisontal negatif (Kelemahan) dan potongan sumbu vertikal negatif (Ancaman). Fokus strategi pada kuadran ini yaitu dengan cara meminimalkan masalah-masalah dalam internal kemudian memanfaatkan peluang yang diidentifikasi (turn-round).

4. Posisi Pada Kuadran IV

Merupakan situasi yang terbentuk oleh potongan sumbu vertikal negatif (Ancaman) dan potongan horisontal positif (Kekuatan). Strategi yang dapat diterapkan pada posisi ini adalah strategi defensif.

2.3 Analisis QSPM

Analisis QSPM merupakan tahap akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik atau prioritas strategi yang akan digunakan. Dari matriks QSPM dapat dilihat nilai TAS (Total Atractivines Score) tertinggi atau nilai skor daya tarik tertinggi yang dapat digunakan dalam penentuan alternatif strategi prioritas atau strategi yang paling cocok untuk dilaksanakan dalam implementasi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi.

Untuk memperoleh nilai TAS (Total Atractivines Score), dilakukan melalui perkalian antara bobot setiap faktor internal dan eksternal dengan nilai AS (Atractivines Score) atau skor daya tarik. Nilai AS atau skor daya tarik diperoleh dari hasil brainstorming antara peneliti dan beberapa subjek informan yang berasal dari pos penyuluhan desa terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) di Kecamatan Purwodadi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan layanan penyuluhan pertanian kepada petani di tingkat desa. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Implementasi pos penyuluhan desa baru dilaksanakan di 4 desa yakni Desa Gerbo, Desa Jatisari, Desa Cowek dan Desa Tambaksari. Sehingga pengamatan terhadap implementasi pos penyuluhan desa dilakukan di desa yang telah mengimplementasikan pos penyuluhan desa yakni di Desa Gerbo, Desa Jatisari, Desa Cowek dan Desa Tambaksari.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Scoring

No	Parameter	Kategori			Total
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	17	5	8	30
2	melaksanakan kegiatan penyuluhan di desa/kelurahan	24	6	0	30
3	menginvetarisasi permasalahan dan pemecahannya	23	6	1	30
4	melaksanakan poses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi petani	14	16	0	30
5	menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha	23	6	1	30
6	melaksanakan rembug tani pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lainnya	13	16	1	30
7	memfasilitasi layanan informasi, konsultasi bagi pelaku utama serta pelaku usaha	9	7	14	30
8	memfasilitasi forum penyuluhan desa	16	10	4	30

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan peran pos penyuluhan desa sebagai tempat melaksanakan kegiatan penyuluhan di desa/kelurahan dapat dikategorikan “berperan”. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa responden bahwa salah satu fungsi pos penyuluhan desa yang paling sering dilakukan adalah sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan di pos penyuluhan desa yakni

mengadakan kegiatan penyuluhan pertanian dan kegiatan pelatihan bagi petani, terutama dalam penerapan teknologi dan inovasi pertanian.

Perumusan strategi peningkatan peran pos penyuluhan desa dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yakni mencari, membandingkan dan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal pelaksanaan fungsi-fungsi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi. Hasil uji IFAS dan EFAS digunakan untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditemukan pada implementasi pos penyuluhan desa. Berikut faktor internal dan faktor eksternal dari pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi.

3.1. Analisis Faktor Internal

Berdasarkan hasil pengumpulan data faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan implementasi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi, maka pada pembahasan hasil dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pemberian rating dan bobot yang diperoleh dari tanggapan pihak responden berlandaskan sudut pandang kepentingan (urgensi) masing-masing faktor yang terdapat dalam pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi. Pemaparan matriks urgensi faktor internal dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Matriks Urgensi Faktor Internal

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Keterangan
	Kekuatan *(strength)*				**Utama**
1	Tersedianya pos penyuluhan desa di beberapa desa	0,15	4	0,60	Tersedianya pos penyuluhan desa di beberapa
2	Respon petani terhadap pelaksanaan penyuluhan di pos penyuluhan desa sangat baik	0,15	4	0,60	Desa Respon petani Terhadap
3	Sebagian besar petani tergabung dalam kelembagaan petani	0,12	3	0,36	pelaksanaan penyuluhan di pos penyuluhan
4	Kegiatan penyuluhan aktif dilakukan di pos penyuluhan desa	0,10	3	0,30	desa sangat baik **Nilai Total =1,86**
	Total	**0,52**	**14**	**1,86**	
	Kelemahan *(weakness)*				**Utama**
1	Kepemilikan lahan pos penyuluhan desa yang masih menjadi kepemilikan pribadi	0,16	3	0,48	Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai
2	Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai	0,15	4	0,60	**Nilai Total = 1,59**
3	Perhatian pemerintah desa yang masih kurang dalam mendukung program- program pos penyuluhan Desa	0,9	3	0,27	
4	Ketersediaan tenaga penyuluh pertanian yang masih kurang dalam pengembangan kegiatan di pos penyuluhan desa	0,8	3	0,24	
	Total	**0,48**	**16**	**1,59**	
	Total I+II	**1,00**	**Total I-II**	**0,27**	

(Sumber: Data primer diolah 2024)

Respon petani yang positif terhadap keberadaan pelaksanaan penyuluhan ditunjukan pada hasil wawancara dan evaluasi fungsi-fungsi pos penyuluhan desa, dimana fungsi pos penyuluhan desa dalam melaksanakan penyuluhan memiliki peran tertinggi dibandingkan pelaksanaan fungsi lainnya. Respon petani yang baik menjadi salah satu kekuatan yang mempunyai beberapa manfaat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pos penyuluhan desa seperti keterbukaan terhadap perubahan, kemauan untuk belajar yang tinggi dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Dengan adanya pos penyuluhan desa penyebaran informasi dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani dapat diselesaikan dengan baik, sehingga petani merasa terbantu dengan adanya pos penyuluhan desa tersebut. Hal tersebut didukung dengan pendapat menurut Nurhasanah, dkk (2024), bahwa respon petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian memberikan respon positif yang disebabkan karena petani selalu ingin mencoba apa yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan meskipun penyuluhan jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi fungsi-fungsi pos penyuluhan desa. Sarana prasarana yang dimiliki oleh setiap pos penyuluhan desa masih belum memadai diantaranya seperti Luasan ruang penyuluhan, akses jalan yang masih rusak dan tidak terdapat sarana pendukung. Selain kendala ruang pertemuan atau penyuluhan, beberapa fasilitas pendukung yang kurang memadai seperti keterbatasan akses internet, listrik dan audio visual serta fasilitas sanitasi menjadi kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi. Keterbatasan fasilitas pendukung tersebut sering menghambat penyampaian teknologi informasi secara efektif kepada petani.

Kepemilikan lahan pos penyuluhan desa menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kegiatan di pos penyuluhan desa. Status kepemilikan lahan yang masih dalam kepemilikan pribadi berdampak pada implementasi fungsi-fungsi pos penyuluhan desa seperti pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani yang membutuhkan lahan khusus untuk menerapakan metode percontohan.

Kelemahan dari faktor status kepemilikan lahan pos penyuluhan desa yang masih menjadi kepemilikan pribadi salah satunya adalah terbatasnya akses bagi petani yang membutuhkan layanan penyuluhan serta tidak meratanya distribusi pelayanan bagi semua petani. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan akses dan menyulitkan bagi petani dengan tempat tinggal di wilayah yang berjauhan dari pos penyuluhan desa.

3.2. Analisis Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil pengumpulan data faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman implementasi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi, maka pada pembahasan hasil dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pemberian rating dan bobot yang diperoleh dari tanggapan pihak responden berlandaskan sudut pandang kepentingan (urgensi) masing-masing faktor yang terdapat dalam pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi.

Tabel 4. Matriks Urgensi Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Keterangan
	Peluang *(Opportunities)*				**Utama**
1	Tersedia beberapa lembaga pendukung Penyuluhan	0,16	4	0,64	Tersedia beberapa lembaga
2	Optimalisasi pelayanan penyuluhan melalui kebijakan penyuluh Swakarsa	0,16	3	0,48	pendukung penyuluhan di sekitar wilayah Kecamatan
3	Hubungan kemitraan dengan perusahaan lokal dan nasional	0,14	4	0,56	Purwodadi **Nilai Total = 2,06**
4	Partisipasi petani dalam kegiatan Musrebang desa	0,12	3	0,36	
	Total	**0,58**	**14**	**2,06**	
	Ancaman *(Threats)*				**Utama**
1	Alih fungsi lahan pos penyuluhan desa	0,15	4	0,60	Alih fungsi lahan pos penyuluhan
2	Partisipasi petani dalam penyuluhan menurun	0,15	3	0,45	Desa
3	Penyebaran teknologi, dan inovasi tidak merata	0,12	4	0,48	**Nilai Total = 1,53**
4	Kegiatan pos penyuluhan desa tidak berjalan optimal				
	Total	**0,42**	**11**	**1,53**	
	Total I+II	**1,00**	**Total I-II**	**0,53**	

(Sumber: Data primer diolah 2024)

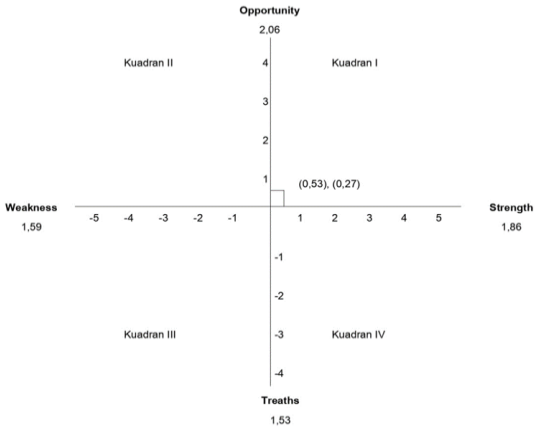
Menurut Programa kecamatan Purwodadi, terdapat beberapa Lembaga pendukung penyuluhan seperti, BRI, KUD, Pasar umum, Pegadaian, BBPP, BRIN, dan beberapa perguruan tinggi yang memiliki hubungan dengan aktifitas pengembangan pertanian di Kecamatan Purwodadi. Adanya beberapa lembaga pendukung penyuluhan, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang dalam peningkatan peran pos penyuluhan desa.

Beberapa peluang yang dapat diciptakan oleh lembaga pendukung seperti pengembangan model penyuluhan yang lebih inovatif, peluang untuk menjalin kemitraan untuk mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan serta peluang untuk mengembangkan kapasitas usaha tani dengan bantuan permodalan, pemasaran produk dan diversifikasi pangan lokal yang terdapat di setiap desa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oktaviani & Lidyana (2023), bahwa kelembagaan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam pembangunan pertanian karena bertindak sebagai mediator bagi masyarakat, mobilisator sumber daya lokal, penggerak, penghimpun dan penyalur sarana dan produksi, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

3.3 Diagram Analisis SWOT

Adapun prioritas dari strategi yang telah dirumuskan dapat ditentukan dari posisi analisis SWOT peran pos penyuluhan desa pada diagram cartesius. Hasil penyusunan matriks SWOT yang diimplementasikan pada

diagram cartesius tergambar dalam gambar berikut:



Berdasarkan beberapa tahap analisis yang telah dilakukan pada faktor internal dan eksternal Pos penyuluhan desa di kecamatan Purwodadi, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi SO (strength-Opportunity). Hal tersebut berdasarkan hasil analisis perhitungan IFAS dan EFAS yang dapat diketahui bahwa nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan serta nilai tertimbang peluang lebih besar daripada ancaman. Hasil tersebut menunjukan posisi strategis Pos penyuluhan desa di kecamatan Purwodadi terletak pada kuadran 1 (Kuadran Growth/pertumbuhan), karena kedua selisih nilai tertimbang IFAS dan EFAS adalah positif, yaitu 0,27 (IFAS) dan 0,53 (EFAS).

Hasil analisis penentuan strategi melalui analisis swot menunjukan bahwa pos penyuluhan desa memiliki kekuatan internal yang kuat dan peluang eksternal yang besar untuk dikembangkan sehingga strategi yang cocok adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan peran pos penyuluhan desa terhadap sistem penyuluhan pertanian di kecamatan Purwodadi. Hal tersebut didukung dengan pendapat menurut Rangkuti (2015), bahwa posisi strategi pada kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena mempunyai peluang dan didukung dengan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (grow oriented strategy).

Untuk mengetahui prioritas alternatif strategi, maka disusunlah alternatif strategi dalam analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treahts)

1. Strategi SO (Strength-Opportunities)
   a. Memanfaatkan program dan dukungan lembaga pendukung penyuluhan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan di pos penyuluhan desa.
   b. Bekerja sama dengan perusahaan sekitar dalam mengembangkan metode dan model percontohan usaha tani.
   c. Menyediakan fasilitas, penghargaan dan insentif finansial untuk meningkatkan motivasi kerja penyuluh swakarsa.
   d. Mengajukan proposal dan rencana anggaran dan biaya pelaksanaan kegiatan di pos penyuluhan desa.
2. Strategi ST (Strength-Threath)
   a. Melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk melekukan pengalihan kepemilikan lahan.
   b. Meningkatkan motivasi para petani untuk dapat mengoptimalisasikan kegiatan pos penyuluhan desa.
   c. Melakukan diskusi dengan Lembaga pendukung penyuluhan untuk membuat peraturan yang mengikat tentang kegiatan Posludes.
   d. Berkoordinasi dengan Lembaga pendukung penyuluhan untuk mengadakan kegiatan diklat tentang peran POSLUDES.
3. Strategi WO (Weakness-Opportunities)
   a. Mengembangkan komoditas lokal sebagai upaya untuk menarik jejaring kemitraan dengan perusahaan sekitar.
   b. Mengajukan program bantuan sarana produksi pertanian pada lembaga pendukung penyuluh.
   c. Menambah tenaga penyuluh swakarsa di setiap pos penyuluhan desa
4. Strategi WT (Weakness-Treath)
   a. Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan lahan khusus untuk pos penyuluhan desa.
   b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau dinas terkait dalam hal ini dinas yang menangani

kegiatan penyuluhan.

c. Berkordinasi dengan Dinas pertanian kecamatan Purwodadi untuk menambah tenaga penyuluh.

3.4 Penentuan Strategi Dengan Analisis QSPM

Analisis QSPM merupakan tahap akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik atau prioritas strategi yang akan digunakan. Dari matriks QSPM dapat dilihat nilai TAS (Total Atractivines Score) tertinggi atau nilai skor daya tarik tertinggi yang dapat digunakan dalam penentuan alternatif strategi prioritas atau strategi yang paling cocok untuk dilaksanakan dalam implementasi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi.Hasil penetapan strategi prioritas yang didapatkan dari analisis QSPM dapat ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 5. Peringkat Alternatif Strategi Implementasi Pos Penyuluhan Desa

No	Alternatif Strategi	Nilai TAS	Peringkat
1	**Strength-Opportunities**		
X1	Memanfaatkan program dan dukungan lembaga pendukung penyuluhan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan di pos penyuluhan desa	6,14	1
X2	Menyediakan fasilitas, penghargaan dan insentif finansial untuk meningkatkan motivasi kerja penyuluh swakarsa	5,23	4
X3	Bekerja sama dengan perusahaan sekitar dalam mengembangkan metode dan model percontohan usaha tani	4,83	8
X4	Mengajukan proposal dan rencana anggaran dan biaya pelaksanaan kegiatan di pos penyuluhan desa	4,99	7
2	**Strength-Treath**		
X5	Melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk melekukan pengalihan kepemilikan lahan.	5,08	6
X6	Meningkatkan motivasi para petani untuk dapat mengoptimalisasikan kegiatan Posluhdes	5,38	3
X7	Melakukan diskusi dengan Lembaga pendukung penyuluhan untuk membuat peraturan yang mengikat tentang kegiatan Posludes	4,99	7
X8	Berkoordinasi dengan Lembaga pendukung penyuluhan untuk mengadakan kegiatan diklat tentang peran Posludes	5,23	4
3	**Weakness-Opportunities**		
X9	Mengembangkan komoditas lokal sebagai upaya untuk menarik jejaring kemitraan dengan perusahaan sekitar	5,40	2
X10	Mengajukan program bantuan sarana produksi pertanian pada lembaga pendukung penyuluh	4,57	9
X11	Menambah tenaga penyuluh swakarsa di setiap pos penyuluhan desa	5,14	5
4	**Weakness-Treath**		
X12	Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan lahan khusus untuk pos penyuluhan desa	4,99	7
X13	Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa atau dinas terkait dalam hal ini dinas yang menangani kegiatan penyuluhan	5,08	6
X14	Berkordinasi dengan Dinas pertanian kecamatan Purwodadi untuk menambah tenaga penyuluh.	5,14	5

Berdasarkan tabel 25 dan perhitungan TAS (Total Atractivines Score), maka prioritas strategi yang dapat digunakan dalam implementasi dan peningkatan peran pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi yakni memanfaatkan program dan dukungan lembaga pendukung penyuluhan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan di pos penyuluhan desa, dengan perhitungan nilai TAS (Total Atractivines Score) sebesar 6,14.

Adanya beberapa lembaga pendukung penyuluhan, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu peluang dalam

peningkatan peran pos penyuluhan desa. Beberapa peluang yang dapat diciptakan oleh lembaga pendukung seperti pengembangan model penyuluhan yang lebih inovatif, peluang untuk menjalin kemitraan untuk mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan serta peluang untuk mengembangkan kapasitas usaha tani dengan bantuan permodalan, pemasaran produk dan diversifikasi pangan lokal yang terdapat di setiap desa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oktaviani & Lidyana (2023), bahwa kelembagaan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam pembangunan pertanian karena bertindak sebagai mediator bagi masyarakat, mobilisator sumber daya lokal, penggerak, penghimpun dan penyalur sarana dan produksi, serta sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

SIMPULAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan pos penyuluhan desa di kecamatan Purwodadi belum sesuai dengan peraturan menteri pertanian no. 03 Tahun 2018 pasan 22 tentang pos penyuluhan desa terhadap system penyuluhan pertanian. Pada evaluasi fungsi-fungsi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi yang memiliki peran tertinggi adalah pelaksanaan fungsi peran pos penyuluhan desa dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Sedangkan pelaksanaan fungsi-fungsi pos penyuluhan desa di Kecamatan Purwodadi yang memiliki peran terendah yakni fungsi pos penyuluhan desa dalam memfasilitasi layanan informasi, konsultasi bagi pelaku utama serta pelaku usaha.

Strategi peningkatan peran pos penyuluhan desa di kecamatan Purwodadi yang dapat diterapkan adalah *growth oriented strategy* dengan alternatif strategi yakni memanfaatkan program dan dukungan lembaga pendukung penyuluhan untuk mengintensifkan kegiatan penyuluhan di pos penyuluhan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pertanian. 2018. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/Sm.140/1/2018 Tentang Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jakarta.

Mardikanto, Totok. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta

Nurhasanah, N.S., Sudrajat & Nurahman, I.S,. 2024. Respon Petani Terhadap Penyuluhan Pertanian Dan Dampaknya Bagi Usaha Tani Padi Di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH. 11(01)

Oktaviani, D.A., & Lidyana, N. 2023. Peran Dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis Sebagai Upaya Pembangunan Pertanian Serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis (JISA). 23(02)

Pelawi, W.D.P., Rosnita, & Yunita, R. 2016. Analisis Kelembagaan utama Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kampar. Ilmiah Pertanian 13(01)

Rangkuti, Freddy. 2015. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sadono, Dwi. 2008. Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. Jurnal penyuluhan. Institut Pertanian Bogor. 4(01).

Sedarmayanti. 2014. Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Jakarta : Mandar maju